

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT
KOMISI D

=====

LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI D DPRD KABUPATEN GARUT
KE PUSKESMAS CISEWU KABUPATEN GARUT TENTANG EVALUASI
PELAKSANAAN BLUD PUSKESMAS CISEWU

=====

PENDAHULUAN

I. DASAR HUKUM

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang–undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No.58/2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri No. 61 / 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD ;
7. Rapat internal Komisi D DPRD Kabupaten Garut tanggal 9 Januari 2017.

II. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Jum'at
Tanggal : 13 Januari 2017
Pukul : 13.00 Wib. s/d Selesai
Tempat : Puskesmas Cisewu Kabupaten Garut
Acara : Kunjungan Kerja Komisi D DPRD Kabupaten Garut ke
Puskesmas Cisewu tentang Evaluasi Pelaksanaan BLUD
Puskesmas Cisewu

III. PERSONALIA

Adapun personalia Korbid dan Anggota Komisi D :

1. H. DADAN HIDAYATULLOH, S.Ag
2. ASEP DE MAMAN, SH
3. AYI NURLUBIS
4. KARNOTO, S.Kep. M.Si

5. CUCU RODIAH, S.Pd
6. Dra. Hj. UUM SUMARTINI, M.Si
7. DANI
8. H. MAJMUDIN MA'ARUP, S.HI
9. IDEN SAMBAS, S.Pd
10. H. TONI ALAMSYAH, H
11. IYUS SUTARMAN
12. Ir. ENDANG KAHFI, MM
13. YUSEP MULYANA, SH. MH
14. TATANG SUMIRAT, S.Pd

IV. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) akan diterapkan pada 31 Puskesmas di Kabupaten Garut. Dari evaluasi yang dilakukan, kata sempurna masih jauh. Kepala puskesmas mengeluhkan kurangnya tenaga harian lepas (THL) untuk menangani Informasi Teknologi (IT) dan Keuangan yang dinilai krusial.

Evaluasi terhadap BLUD digelar kemarin di Puskesmas Kami kekurangan tenaga IT. Akan sulit dengan kondisi sekarang kata salah seorang Kepala Puskesmas dalam Kunjungan Kerja Komisi D DPRD Kabupaten Garut ke Puskesmas Pameungpeuk saat pertemuan diberikan waktu tanya jawab.

Definisi BLUD Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) instansi lingkungan pemerintah SKPD/Unit kerja) Memberikan pelayanan kepada masyarakat Mengelola kawasan dan dana tertentu Tidak semata-mata meraih keuntungan Dikelola prinsip efisien dan efektifitas

Tujuan BLUD Memberikan yankesmas berupa penyediaan barang dan / jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari untung dan dalam melakukan kegiatan berdasar prinsip efisiensi dan produktifitas

RSB Merupakan dokumen lima tahunan yang memuat visi-misi-program strategis pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian limatahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan dengan BLUD.

Kendala Pelaksanaan BLUD SDM terbatas (tenaga akuntan Th 2015) Data pendukung belum lengkap (menghitung piutang, nilai hibah,dll) Perubahan dokumen/teknis pencatatan dan pelaporan Keuangan belum memadai, sehingga masih ada sebagian indikator disubsidi Dinas Kesehatan

Upaya Pemecahan Masalah Mengoptimalkan SDM yang ada, mulai tahun 2015 menggunakan tenaga yang ada sebagai pegawai BLUD Non PNS Dinas Kesehatan bekerjasama dengan BPKP melakukan pendampingan tentang administrasi keuangan BLUD Melengkapi/merevisi perubahan dokumen/teknis

pencatatan dan pelaporan BLUD Meskipun sudah BLUD Penuh, namun Dinas Kesehatan tetap sebagai pembina Puskesmas

Manfaat BLUD Puskesmas dapat membuat inovasi kegiatan berkaitan dalam pengelolaan keuangan BLUD Pengelolaan keuangan BLUD lebih fleksibel dalam menerapkan praktek bisnis yang sehat tanpa meninggalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Kesimpulan Penerapan Puskesmas menjadi BLUD Bertahap mulai tahun 2014, selanjutnya menjadi BLUD Penuh TH 2016 Untuk menjadi BLUD penuh diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, sesuai ketentuan yang berlaku (SDM), perangkat kerja, dana), serta komitmen dari Top Manajemen dan Staf.

ASEP DE MAMAN, SH.

Menyampaikan ucapan Selamat atas prestasi yang diperoleh juara III Nasional, secara administratif, tingkat Provinsi Jawa Barat juara I, terimakasih, administrasi dan pelayanan, agar kedepan lebih baik. BLUD pelayanan Kesehatan yang prima. Kami juga apresiasi gKabupaten Garut punya Puskesmas yang dibanggakan, ada Puskesmas berprestasi, administrasinya yang bagus. Juga Puskesmas Malangbong.

Jarak karena kami baru berkunjung Puskesmas ini jadi acuan BLUD selama 1 tahun ingin mengetahui, apa keuntungan manfaatnya, mamfaat bagi Puskesmas dan masyarakat. BLUD menuju pelayanan yang prima, dalam Pembendagri 61 fleksibilitas PPK BLUD, harapan tidak hanya profit orientid. Pelayanan SOP nya, juga dokumentasinya minta Poned minta data, koordinator bidang ingin ke Cisewu, ingin study banding.

Pelayanan 30 s/d 50 capai 500. Rawat inip capai 100 %. Ibu hamil kunjungan hamil KB tercapai 72 % kontak dengan ibu hamil 100 % imunisasi UCI dasar telah terpenuhi serta kapasitas bidan Desa 6 dari 9 Desa pamekaran oleh bidan sukwan harus hadir kesini. Pakai perbub BLUD. Kader ada 350 Posyandu 58.

Dampak 9 desa tenaga terbatas, infra stuktur sarana transportasi, maka stuktur. BPJS lancar 13 ribu jadi 16 sampai 16 ribu, masuk ke Sindangratu kami tidak boleh memaksa. Paskesnya. Pembayaran BPTN pensiunan.

Lebih dipercepat pelayanannya dari pada admistrasi.

PJS banyak kendala aturan yang berubah rubah. Sosialisai harus sampai minimal kepala Desa. Banyak kejadian,

Masalah BPJS, masalah keramahan, pelayanan minta ditingkatkan.

RIZAL Perawat.

Lagi berobat gratis tapi pulang harus bayar, pasien rujukan bisa ditangani tapi kalau ke Bandung tidak biasa di klemkan. harus ada MOU Garut dengan kabupaten Bandung.

Kita akan coba kalau BPJS ini secara nasional, mungkin bisa. Kita bicarakan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Yang jadi masalah ke luar kabupaten tidak bisa di klemkan, ke BPJS.

Rujukan masyarakat damai, pegawai pusat daerah, yang dirujuk pasien, jalan minta diperbaiki, jarak 15 KM. Cianjur sebab Masyarakat Cianjur Banyak Yang berobat ke Cisewu.

Peraturan Bupati yang menunjang jalannya Puskesmas BLUD adalah :

1. Perbup No 1172 tahun 2015 Tentang Tarif Puskesmas
2. Perbup No 1406 tahun 2015 tentang SPM
3. Perbup No 1426 tahun 2015 Tentang Tata Kelola
4. Perbup No 1465 tahun 2015 Tentang RBA
5. Perbup No 6 tahun 2016 Tentang Pegawai Non PNS

V. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan tindak lanjut seperlunya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GARUT

KOMISI D

Ketua,

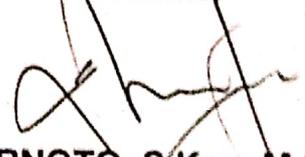


ASEP DE MAMAN, SH

Wakil Ketua,

AYI NURLUBIS

Sekretaris



KARNOTO, S.Kep. M.Si